



Analisis Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Erma Nuril Fajriah ^{1*}, dan Nur Fitriana²

¹ Universitas Muhammadiyah Riau; Pekanbaru, Riau; email : ermanuril15@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Riau; Pekanbaru, Riau; email : NuRFitri@UMRI.ac.id

* Corresponding Author : Erma Nuril Fajriah

Abstract: The purpose of this study was to determine the Effect of Compensation Suitability, Internal Control, Accounting Information Systems on Fraud Prevention at the Riau Province Village Community Empowerment, Population, and Civil Registration Office. The research method used a qualitative descriptive method using two data, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews with informants, documentation during internships and observations. Secondary data was obtained from previous research results and books related to the research topic. The results showed that the Compensation Suitability Factor, Internal Control, Accounting Information Systems had a significant effect on fraud prevention at the Riau Province Village Community Empowerment, Population, and Civil Registration Office. However, financial education, morality, transportation and accountability factors are challenges for the Riau Province Village Community Empowerment, Population, and Civil Registration Office in increasing public knowledge in managing village cash. In the study, the researcher had limited time in the internship activities which were carried out in only two months so that it had an impact on the research results which were less comprehensive and obtained limited information. It is hoped that further researchers can conduct comprehensive research by highlighting broader factors so that better research results can be obtained.

Keywords: Fraud; Internal Control; Competency Compliance; Accounting Information System; DPMDUKCAPIL RIAU

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua data yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan, dokumentasi selama magang dan observasi. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Namun faktor pendidikan keuangan, Moralitas, transportasi dan akuntabilitas menjadi tantangan bagi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola kas Desa. Dalam penelitian, peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam kegiatan magang yang dilakukan hanya dalam dua bulan sehingga berdampak pada hasil penelitian yang kurang menyeluruh dan memperoleh informasi yang terbatas. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian secara menyeluruh dengan mengangkat faktor yang lebih luas sehingga hasil dari penelitian dapat diperoleh dengan lebih baik.

Diterima: 2 May 2025

Direvisi: 19 May 2025

Diterima: 29 June 2025

Diterbitkan: 4 July 2025

Versi sekarang: 4 July 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Kata kunci: Kecurangan; Pengendalian Internal; Kesesuaian Kompetensi; Sistem Informasi Akuntansi; DPMDDUKCAPIL RIAU

1. Pendahuluan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah sebuah entitas masyarakat yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, sesuai dengan inisiatif dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan tradisi, asal usul, dan hak-hak yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pakpahan & Faâ, 2020). Meskipun sering diabaikan oleh sebagian masyarakat, pentingnya peran desa tak terbantahkan karena merupakan tulang punggung pemerintahan. Desa memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan perkotaan, karena kesejahteraan perkotaan sangat tergantung pada produktivitas dan kesejahteraan desa. Pembentukan desa didasarkan pada inisiatif masyarakat, dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial-budaya lokal.

Untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Desa, diperlukan peraturan pemerintah yang mengatur implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagian 8 Pasal 71 menyatakan mengenai keuangan desa dan aset desa, di mana seluruh pendapatan desa akan diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa, serta penggunaannya akan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Harefa et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan desa didasarkan pada prinsip hak asal usul dan kewenangan lokal pada tingkat desa yang didanai oleh APBDes, namun juga bisa mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Desa (DAD).

Kecurangan dalam perusahaan merupakan suatu tindakan kecurangan yang disengaja atas dasar ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang baik karyawan maupun pimpinan yang berakibat merugikan perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial, karena kecurangan pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Dalam salah satu kecurangan yang sering terjadi di perusahaan yaitu kecurangan persediaan dan dana. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang cukup besar dan merupakan faktor penting yang menentukan kelancaran operasional perusahaan (Ferdiani, 2024).

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau kecurangan dapat meningkat karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Dana Desa. Namun, masih ditemukan beberapa kasus di mana proses pengelolaan keuangan desa tidak sepenuhnya transparan, dan ditemukan adanya kecurangan dalam mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Terungkap bahwa terdapat variasi dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan melakukan melaporkan hasil pencapaian, pengendalian dan evaluasi. Pengendalian internal memiliki manfaat untuk membantu perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang

baik dapat mencegah terjadinya kecurangan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang kurang baik (Damayanti). Sesuai dengan hasil penelitian Ferdiani (2024), Damayanti dkk. (2024), Hartono dkk. (2022) bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Adiko dkk. (2019) bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Selain pengendalian internal yang baik, perusahaan juga membutuhkan sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan up to date dalam upaya pencegahan kecurangan. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mencatat semua proses bisnis dalam sebuah model sistem yang nantinya akan menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh banyak pihak. (Puspita et al., 2021). Sesuai dengan hasil penelitian Ferdiani (2024), Damayanti dkk. (2024), Silva dan Aufa (2023) bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Ridwan dkk. (2023) bahwa tidak terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor selanjutnya dalam meminimalisir tingkat kecurangan adalah salah satunya dengan kesesuaian kompensasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud. Dengan adanya kompensasi yang sesuai, maka kecurangan dapat diminimalisir. Individu diharapkan mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan kecurangan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. (Samanto et al., 2022). Sesuai dengan hasil penelitian Aprillia dan Sulfitri (2023), Samanto dkk. (2022), Triwahyuni dan Prasetyo (2021) bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Namun berbeda dengan hasil penelitian Herawati dan Purnamasari (2022) bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ferdiani (2024) yang berjudul "Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan Moralitas Manajemen terhadap Pencegahan Kecurangan". Perbedaan dalam penelitian ini adalah dengan mengubah faktor Moralitas Manajemen menjadi kesesuaian kompensasi yang diambil dari penelitian Samanto dkk. (2022) sebagai bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya. Alasan ditambahkannya Faktor tersebut adalah karena kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan dapat mencegah upaya untuk melakukan kecurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Bagian Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau penyebab perilakunya. Teori atribusi merupakan kombinasi dari kekuatan internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti faktor kemampuan usaha dan kekuatan eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam bekerja atau keberuntungan. Menurut Heider (1958) ada tiga tahap yang mendasari proses terjadinya atribusi, yaitu: 1) Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku; 2) Seseorang harus meyakini bahwa perilaku tersebut memang sengaja dilakukan; dan 3) Seseorang harus menentukan apakah ia meyakini bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Hubungan teori atribusi dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan kesesuaian kompensasi merupakan faktor eksternal dan moralitas manajemen merupakan faktor internal yang dapat meminimalisir terjadinya fraud.

2.2 Teori Dua Faktor Herzberg

Menurut teori ini ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu faktor pemuas (motivation factor) yang disebut juga dengan satisfier atau intrinsic motivation yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang, dan faktor kesehatan (hygienes) yang juga disebut disatisfier atau ekstrinsic motivation yaitu daya dorong yang

datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja. Jadi pegawai yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang memungkinkannya menggunakan kreativitas dan inovasinya, bekerja dengan tingkat otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. Kepuasan disini tidak terutama dikaitkan dengan perolehan hal-hal yang bersifat materi. Sebaliknya, mereka yang lebih terdorong oleh faktor-faktor ekstrinsik cenderung melihat kepada apa yang diberikan oleh organisasi kepada mereka dan kinerjanya diarahkan kepada perolehan hal-hal yang diinginkannya dari organisasi.

2.3 Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil lainnya, dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian tujuan dalam kaitannya dengan operasi, laporan dan pencapaian tujuan. Berdasarkan teori atribusi, dalam penelitian ini pengendalian internal merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi karyawan dalam berperilaku, dimana pencegahan kecurangan dapat dilakukan jika pengendalian internal lebih efektif diterapkan dalam perusahaan. Pengendalian internal merupakan kebijakan, prosedur, dan metode yang dirancang untuk memberikan keyakinan atas tercapainya keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan peraturan lainnya. (Risdayana, 2022). Hasil penelitian Ferdiani (2024), Damayanti dkk. (2024), Hartono dkk. (2022) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

2.4 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi berupa data transaksi bisnis yang kemudian diolah dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan yang memiliki arti bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan teori atribusi, dalam penelitian ini sistem informasi akuntansi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi karyawan dalam berperilaku, dimana jika sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan buruk dan kegiatan pencegahan kecurangan tidak maksimal, maka dapat menyebabkan kecurangan semakin meningkat. Dengan adanya sistem informasi yang memadai dan didukung dengan teknologi informasi yang baik, maka dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. (Loliani dan Anwar, 2020) Hasil penelitian Ferdiani (2024), Damayanti dkk. (2024), Silva dan Aufa (2023) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

2.5 Kesesuaian Kompensasi

Kesesuaian kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka kepada perusahaan. Berdasarkan teori atribusi, dalam penelitian ini kesesuaian kompensasi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi karyawan dalam berperilaku, dimana melalui pemberian kompensasi yang sesuai, karyawan akan merasa bahwa organisasi memperhatikan kesejahteraannya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan seperti kecurangan atau pencurian aset yang dilakukan karyawan. (Triwahyuni dan Prasetyo, 2021). Hasil penelitian Ferdiani (2024), Damayanti dkk. (2024), Hartono dkk. (2022) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada masalah-masalah atau fenomena aktual pada saat penelitian dilakukan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Yulianty & Jufri (2020) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif dalam menganalisis data harus dilakukan dengan teliti sehingga mampu menjelaskan data dan menjadi penelitian yang layak. Penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau berlokasi di Jl. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 05 Mei sampai dengan 17 Juli 2025. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dalam menganalisis data. Data primer di peroleh dari hasil wawancara kepada narasumber, observasi di tempat penelitian, dan dokumentasi selama magang. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada tanggal 02 Juni 2025 saat kegiatan magang berlangsung. Informan dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab informan masing-masing dengan informan terdiri atas tiga orang terdiri dari Bapak Dedi Bastian, Bapak Masri Hariyanto, dan Bapak M. Royyan Hidayatullah. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dengan judul yang berkaitan dan tempat lokasi penelitian yang sama serta data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari staf pekerja di tempat peneliti. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan lalu disusun dan dianalisis kedalam sebuah kalimat yang mudah dipahami sehingga memperoleh informasi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil yang didapatkan penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat keterlibatan yang bervariasi dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun beberapa desa telah berhasil melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, masih ada tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di desa-desa yang memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran yang rendah hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan dana yang dapat memicu terjadinya kecurangan akibat keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana yang kurang terstruktur dan pengetahuan masyarakat yang kurang dalam mengelola dana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan penyebab terjadinya kecurangan dalam mengelola dana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau.

Informan 1

“Masih banyak ditemukan pengelola dana oleh pihak dari Desa yang belum memahami pengelolaan keuangan. Ditemukan banyak masyarakat Desa yang tertinggal, hal ini dapat dilihat dari hasil bumi yang banyak seperti kelapa sawit, karet, dan lainnya yang belum dapat dikelola oleh masyarakat desa. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pengelola untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat (aparatur Desa) untuk dapat mengelola keuangan Desa sehingga dapat dipergunakan dengan maksimal”.

Informan 2

“Pengelola Desa belum memahami cara yang tepat dalam mengendalikan keuangan sehingga dipergunakan dengan kurang maksimal, padahal dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi telah melakukan penyuluhan kepada setiap Desa dalam mengelola kas Desa namun hasil yang diharapkan belum dapat terjangkau pada semua Desa”.

Informan 3

“Keterbatasan Desa dalam mengelola kas Desa dapat terjadi karena keterbatasan pendidikan keuangan bagi masyarakat yang bertanggung jawab atas kas Desa. Faktor lainnya kurangnya transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mengakibatkan kecurangan dalam pengelolaan Kas Desa. Sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang dapat mengakibatkan kecurangan. Upah yang kurang sesuai dapat menjadi faktor seseorang melakukan kecurangan dalam mengelola kas Desa”.

Berdasarkan informasi dari informan diatas ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya kecurangan. Dan menunjukkan bahwa ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Dana Desa. Sehingga masih ditemukan beberapa kasus di mana proses pengelolaan keuangan desa tidak sepenuhnya transparan, dan ditemukan adanya kekurangan dalam mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Kurangnya kemajuan teknologi setiap daerah juga berdampak pada penerimaan sistem informasi yang kurang cepat sehingga berdampak pada masyarakat yang tidak mengetahui informasi terbaru yang dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan yang kurang maksimal. Dari hal ini dibutuhkan kerjasama dari pemerintah pusat agar melakukan pembangunan secara merata dalam kemajuan teknologi seperti internet sehingga dapat dijangkau oleh semua masyarakat sampai ke pelosok daerah sehingga informasi dapat dijangkau dengan cepat. Hal ini juga sangat berpengaruh pada sistem informasi akuntansi dalam mengelola kas Desa bagi masyarakat. Terungkap bahwa terdapat variasi dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Beberapa desa dan

petugas di dinas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan desa secara efektif, sementara yang lain masih memerlukan pelatihan dan bimbingan lebih lanjut. Masyarakat yang bekerja butuh upah yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga dapat mengurangi kecurangan.

4.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau telah mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan secara periodik seluruh sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian yang penting, sehingga kecurangan dapat dicegah atau diminimalisir. Semakin kuat pengendalian internal yang ada di perusahaan, maka dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan, begitu juga sebaliknya, jika pengendalian internal lemah, maka kecenderungan terjadinya kecurangan atau fraud akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi, dimana pencegahan kecurangan dapat dilakukan jika pengendalian internal semakin efektif diterapkan pada perusahaan. Pengendalian internal merupakan kebijakan, prosedur, dan metode yang dirancang untuk memberikan keyakinan atas tercapainya keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan peraturan lainnya. (Risdayana, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ferdiani (2024), Damayanti dkk. (2024), Hartono dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

4.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama magang penelitian menemukan bahwa indikator jaringan komunikasi sangat dibutuhkan dalam memperoleh sistem informasi akuntansi. Dalam hal ini, sistem informasi yang ada di perusahaan dapat menyajikan laporan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat mengurangi kecurangan. Sistem informasi akuntansi berguna sebagai pengendalian dan pengawasan dalam meminimalisir terjadinya kecurangan dalam perusahaan, sehingga semakin baik kualitas sistem informasi akuntansi maka akan semakin tinggi pula pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi, dimana jika sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan buruk dan kegiatan pencegahan kecurangan tidak maksimal, maka dapat menyebabkan kecurangan semakin meningkat. Dengan adanya sistem informasi yang memadai dan didukung dengan teknologi informasi yang baik, maka dapat meminimalisir terjadinya fraud. (Loliyani dan Anwar, 2020) Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ferdiani (2024), Damayanti dkk. (2024), Silva dan Aufa (2023) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan fraud

4.3 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil penelitian responden menyatakan setuju pada indikator kompensasi langsung. Dalam hal ini jika kompensasi atau gaji yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya maka kecenderungan karyawan untuk melakukan kecurangan akan rendah sehingga kecurangan dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi, dimana melalui kompensasi yang layak, karyawan akan merasa bahwa organisasi memperhatikan kesejahteraannya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan seperti kecurangan atau pencurian aset yang dilakukan karyawan. (Triwahyuni dan Prasetyo, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ferdiani (2024), Damayanti dkk. (2024), Hartono dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan..

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan seperti faktor pendidikan, moral, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang kurang sehingga kecurangan dalam mengelola kas Desa masih ditemukan di beberapa Desa dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam

memperoleh data selama kegiatan magang yang dapat mengakibatkan kurangnya informasi yang diperoleh. Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dan dapat menjelaskan lebih detail hasil penelitian.

Referensi

- [1] Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafisah. (2019). Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud PT. Inalum. *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 2(1), 52-68.
- [2] Aprillia, R., & Sulfitri, V. (2023). Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Manajemen Pascasarjana*, 3(1), 36-48.
- [3] Damayanti, A. A., Himmawan, A., & Nugroho, D. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Audit Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Siklus Persediaan. *BLAYA: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 9085-9094.
- [4] Ferdiani, A. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Moralitas Manajemen Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 20(1), 27-37.
- [5] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Hartono, A. B., Himmawan, A., & Nugroho, D. (2022). Nilai Wajar : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dengan intervening good corporate governance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 1912-1920.
- [7] Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations (Psikologi Hubungan Interpersonal)*. New York: Wiley.
- [8] Herawati, T. A., & Purnamasari, P. (2022). Pengaruh Perilaku Etis Karyawan dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Bandung Conference Series: Akuntansi*, 2(2), 1081-1085.
- [9] Loliyani, R., & Anwar, A. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Persediaan Karet Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan) (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara VII Kedaton Bandar Lampung). *Jurnal Gema Ekonomi*, 10(1), 1517-1530.
- [10] Nikmatia, A., Rahmawati, & Bachri, S. (2021). Pengaruh Moralitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dana BUMDES Di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Artikel. Universitas Muhammadiyah Palopo*.
- [11] Ningsih, N. H., Sabrina, N., Amelia, L., & Suprayogi, Y. (2024). Pengendalian Internal Penjualan E-Ticket Dan Moralitas Manajemen Pengendalian Internal Penjualan E-Ticket Dan Moralitas Manajemen Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada PT Kereta Api Indonesia Divisi III Palembang. *JMWE: Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(4), 745-756.
- [12] Puspita, T. E., Supartini, Abdullah, S., & Maryanti, I. E. (2021). Analisis Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Dan Moralitas Manajemen Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Persediaan Di PT. Rinjani Farma. *Jurnal Ganeshwara*, 1(2), 1-9.
- [13] Ridwan, R., Lestari, D. F., Arifah, A. N., & Abdurachman, A. (2023). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mencegah Kecurangan: Pendekatan Studi Di Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 211-218.
- [14] Risdaryana. (2022). Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pencegahan Fraud Dengan Penguatan Anti Fraud Awareness. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- [15] Samanto, H., Pravasanti, Y. A., & Saputra, S. A. (2022). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak (JAP)*, 22(2), 1-7.
- [16] Silva, D. N., & Aufa, M. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud pada Persediaan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 2464-2476. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i11.651>

- [17] Sudariani, N. M. R., & Yudiantara, I. G. A. P. (2021). Pengaruh Kompetensi Pengelola, Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(1), 830-841.
- [18] Triwahyuni, & Prasetyo, A. (2021). Pencegahan Fraud Pada Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gombong: Peran Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 44-55.